

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jl. Empu Mandastana No.10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037

e-mail : pa.amuntai@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Empu Mandastana No.10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Telp. 052761002 Fax. 052763037

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SUAIFUDDIN.S.Ag
NIP.197307022000031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	43
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	47
C.6. Ekuitas	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2. Beban Pegawai	49

D.3.	Beban Persediaan	50
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	51
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	53
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	58
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	58
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	58
E.3.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	59
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	62
	Daftar Hibah Langsung.....	66

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	36
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	37
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	38
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	39
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	40
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	41
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	41
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	42
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	42
Tabel 25 Rincian Aset Tetap	43
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017	48
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018.....	63
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	67
Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	68

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Amuntai

**Jl.Empu Mandastana No.10 Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara -
Kalimantan Selatan 71418**

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SUAIFUDDIN.S.Ag
NIP.197307022000031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.702.357 atau mencapai 63,36 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp9.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp3.573.443.274 atau mencapai 50,70 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.047.749.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	9.000.000	5.702.357	63,36	3.666.220
Belanja Negara	7.047.749.000	3.573.443.274	50,70	3.683.820.975

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.627.681.889, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp38.743.600; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7.588.938.289; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp38.400.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp38.400.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp7.589.281.889.

Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	64.346.280	449.100	38.294.500	8,52
Aset Tetap	7.588.938.289	5.252.383.479	2.336.554.810	44,48
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	7.627.681.889	5.252.832.579	2.374.849.310	45,21
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	38.400.000	14.394.822	24.005.178	166,76
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	38.400.000	14.394.822	24.005.178	166,76
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	7.589.281.889	5.238.437.757	2.350.844.132	44,87
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.627.681.889	5.252.832.579	2.374.849.310	45,21

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.102.163, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.765.153.372 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.763.051.209) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp3.735.694 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp3.759.315.515

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp5.238.437.757 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(3.759.315.515) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.542.418.730 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.567.740.917 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp7.589.281.889.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2018 DAN TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	9.000.000	5.702.357	63,36	3.666.220
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		9.000.000	5.702.357	63,36	3.666.220
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	6.177.658.000	3.231.875.601	52,32	2.747.837.375
2.	Belanja Barang	B.2.2.	779.091.000	341.567.673	43,84	378.539.600
3.	Belanja Modal	B.2.3.	91.000.000	0	0,00	557.444.000
	Jumlah Belanja Negara		7.047.749.000	3.573.443.274	50,70	3.683.820.975

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI NERACA PER 30 JUNI TA 2018 DAN TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1	0	0
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	38.400.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	343.600	449.100
Jumlah Aset Lancar		38.743.600	449.100
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	(203.210.000)	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.417.007.982	2.417.007.982
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.927.898.000	5.239.176.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5.643.998	5.643.998
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.972.401.691)	(2.823.445.001)
Jumlah Aset Tetap		7.588.938.289	5.252.383.479
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	206.500.661	206.500.661
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(206.500.661)	(206.500.661)
Jumlah Aset		7.627.681.889	5.252.832.579
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	38.400.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		38.400.000	0
Jumlah Kewajiban		38.400.000	0

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

C.6

Jumlah Ekuitas Dana

7.589.281.889

5.238.437.757

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

7.627.681.889

5.252.832.579

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI TA 2018 DAN TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.102.163	3.666.736
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.217.926.979	2.734.750.865
Beban Persediaan	D. 3	21.003.000	20.541.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	159.077.837	150.319.862
Beban Pemeliharaan	D. 5	137.548.436	167.896.230
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	23.733.200	35.889.650
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	205.863.920	192.943.975
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		3.765.153.372	3.302.341.832
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		3.600.000	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		135.694	42.316
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		3.735.694	42.316

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	3.759.315.515	3.298.718.412

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI TA 2018 DAN TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
Ekuitas Awal	E. 1	5.238.437.757	5.063.074.613
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	3.759.315.515	3.298.718.412
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	2.542.418.730	2.542.418.730
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	3.567.740.917	3.680.154.755
Ekuitas Akhir		7.589.281.889	5.444.510.956

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah

- 1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik itu koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/ sekretariat pengadilan.
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran.
7. Terwujudnya efektifitas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
8. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
9. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp5.702.357*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp5.702.357 atau mencapai 63,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.000.000	2.102.163	70,07
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.000.000	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Akun 423951	0	78	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Akun 425911	0	116	0,00
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	3.600.000	0,00
Total Pendapatan		9.000.000	5.702.357	63,35

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.036.137 atau (55,53) persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN;

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.102.163	2.206.806	(104.643)	(4,74)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.458.930	(1.458.930)	(100,00)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Akun 423951	78	484	(406)	(83,88)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Akun 425911	116	0	116	0,00
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	3.600.000	0	3.600.000	0,00
Total Pendapatan		5.702.357	3.666.220	2.036.137	55,53

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
3.573.443.274

4

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp3.573.443.274 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 50,70% dari anggaran senilai Rp7.047.749.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

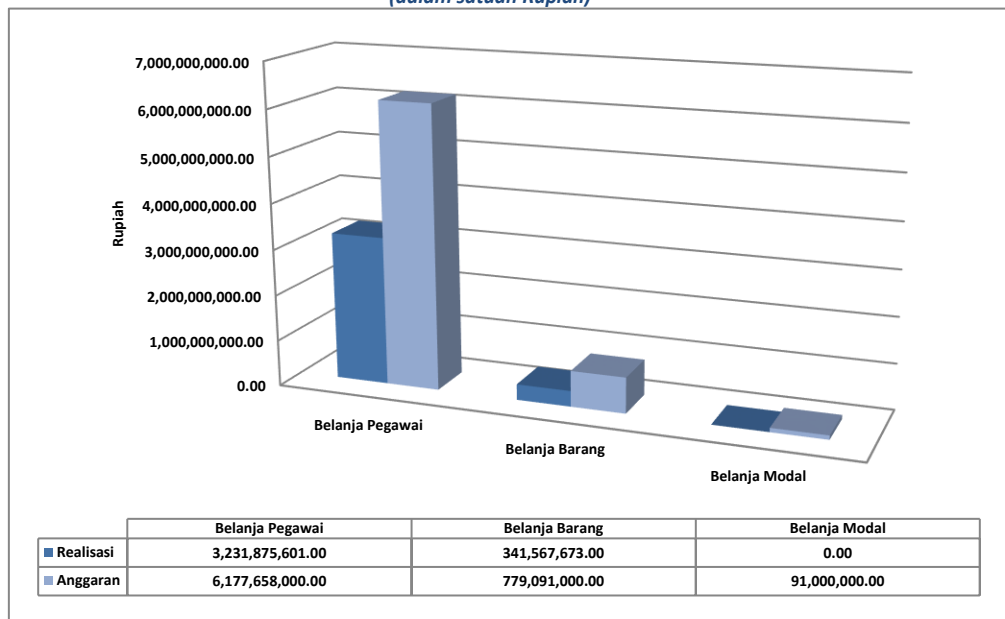
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.177.658.000	3.231.875.601	52,32
Belanja Barang	779.091.000	341.567.673	43,84
Belanja Modal	91.000.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	7.047.749.000	3.573.443.302	50,70

Pengembalian Belanja		(28)	0
Total Belanja Netto	7.047.749.000	3.573.443.274	50,70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp(110.377.701) atau sebesar (2,99) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Menurunnya belanja barang;
2. Belum terealisasi nya belanja modal;

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.231.875.601	2.747.837.375	484.038.226	17,61
Belanja Barang	341.567.673	378.539.600	(36.971.927)	(9,76)
Belanja Modal	0	557.444.000	(557.444.000)	(100,00)
Total Belanja	3.573.443.274	3.683.820.975	(110.377.701)	(2,99)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3.231.875.601
1

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp3.231.875.601 dan Rp2.747.837.375.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp484.038.226 atau 17,61 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya seluruh pos realisasi belanja pegawai;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	989.518.100	915.283.420	74.234.680	8,11
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.559	9.319	1.240	13,30
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	73.950.990	60.759.962	13.191.028	21,71
Beban Tunj. Anak PNS	24.037.654	21.220.752	2.816.902	13,27
Beban Tunj. Struktural PNS	17.660.000	15.600.000	2.060.000	13,20
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.600.400.000	1.286.450.000	313.950.000	24,40
Beban Tunj. PPh PNS	219.794.526	168.975.793	50.818.733	30,07
Beban Tunj. Beras PNS	46.348.800	45.045.240	1.303.560	2,89
Beban Uang Makan PNS	137.470.000	117.228.000	20.242.000	17,26
Beban Tunjangan Umum PNS	3.885.000	3.865.000	20.000	0,51
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	118.800.000	113.400.000	5.400.000	4,76
Total Belanja Brutto	3.231.875.629	2.747.837.486	484.038.143	17,61
Pengembalian Belanja	(28)	(111)	(83)	(74,77)
Total Belanja Netto	3.231.875.601	2.747.837.375	484.038.226	17,61

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp341.567.673

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 341.567.673 dan Rp. 378.539.600.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 36.971.927 atau 9,76 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya realisasi belanja barang operasional;
2. Menurunnya realisasi belanja barang non operasional

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	133.206.392	131.639.640	1.566.752	1,19
Belanja Barang Non Operasional	0	1.845.000	(1.845.000)	(100,00)
Belanja Persediaan	25.140.000	23.772.000	1.368.000	5,75
Belanja Jasa	26.317.645	20.923.080	5.394.565	25,78
Belanja Pemeliharaan	133.170.436	164.470.230	(31.299.794)	(19,03)
Belanja Perjalanan Dinas	23.733.200	35.889.650	(12.156.450)	(33,87)
Total Belanja Brutto	341.567.673	378.539.600	(36.971.927)	(9,76)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	341.567.673	378.539.600	(36.971.927)	(9,76)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp557.444.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 0 atau 100,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum terealisasinya untuk belanja modal;

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	507.491.500	(507.491.500)	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Iaringan	0	44.952.500	(44.952.500)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0	5.000.000	(5.000.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	0	557.444.000	(557.444.000)	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	557.444.000	(557.444.000)	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp38.743.600

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp38.743.600 dan Rp0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.400.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	449.100
Persediaan	343.600	0
Total Aset Lancar	38.743.600	449.100

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp38.400.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp38.400.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1	Uang Persediaan	38.400.000	0
	Jumlah	38.400.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp38.400.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1	Belanja dibayar di muka (prepaid)	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp343.600*

Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.343.600 dan Rp449.100. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember TA 2017

No.	Uraian	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
1	Barang Konsumsi	343.600	449.100
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		343.600	449.100

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp7.588.938.289
⁹

Nilai Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 tersaji sebesar Rp7.588.938.289 dan Rp5.252.383.479 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	210.790.000	414.000.000	(203.210.000)
2	Peralatan dan Mesin	2.417.007.982	2.417.007.982	0
3	Gedung dan Bangunan	6.927.898.000	5.239.176.500	1.688.721.500
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	5.643.998	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	9.561.339.980	8.075.828.480	1.485.511.500
	Akumulasi Penyusutan	(1.972.401.691)	(2.823.445.001)	(851.043.310)
	Nilai Buku Aset Tetap	7.588.938.289	5.252.383.479	2.336.554.810

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp210.790.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp210.790.000 dan Rp414.000.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	197 m2	54/Sungai Malang/2012	Mahkamah Agung	Gedung Kantor	210.790.000
Jumlah						210.790.000

Nilai Perolehan Aset, Tetap berupa Tanah per 30 Juni TA 2018 dan per 31 Desember TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp210.790.000 dan Rp414.000.000 Adanya penurunan nilai aset tanah sebesar Rp203.210.000 atau 49.08 persen dari TA 2017;

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :
Rp2.417.007.982*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.2.417.007.982 dan Rp. 2.417.007.982

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni TA 2017	2.417.007.982
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni TA 2018	2.417.007.982
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni TA 2018	1.894.075.315
Nilai Buku 30 Juni TA 2018	522.932.667

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni TA 2018 dan per 31 Desember TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.417.007.982 dan Rp2.417.007.982 Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp0 Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp0 Penambahan sebesar Rp0 tidak ada penambahan nilai dari pembelian barang menggunakan akun belanja barang dan belanja modal peralatan dan mesin;

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp6.927.898.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.927.898.000 dan Rp5.239.176.500

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni TA 2017	5.239.176.500
Mutasi Tambah	1.688.721.500
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni TA 2018	6.927.898.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	78.326.376
Nilai Buku 30 Juni 2018	6.849.571.624

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp6.927.898.000 dan Rp5.239.176.500. Adanya kenaikan nilai gedung sebesar Rp. 1.688.721.500 atau 32.23 persen dari TA 2017.

Hal ini disebabkan karena :

1. Kenaikan nilai Gedung sebanyak 2 buah
2. Kenaikan nilai Rumah Dinas sebanyak 2 buah
3. Kenaikan nilai Pagar Kantor dan Pos Jaga

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni TA 2017	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni TA 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni TA 2018	0
Nilai Buku 30 Juni TA 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp5.643.998*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.643.998 dan Rp5.643.998

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni TA 2017	5.643.998
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	5.643.998
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	5.643.998

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp1.972.401.691*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing Rp1.972.401.691 dan Rp2.823.445.001

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.417.007.982	1.894.075.315	522.932.667
2	Gedung dan Bangunan	6.927.898.000	78.326.376	6.849.571.624
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	0	0
Jumlah		9.350.549.980	1.972.401.691	7.372.504.291

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp206.500.661*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp206.500.661 dan Rp206.500.661 Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Amuntai serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2017	206.500.661
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	206.500.661

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp38.400.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp38.400.000 dan Rp0 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai per 30 Juni TA 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	38.400.000	0
Jumlah	38.400.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp38.400.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp38.400.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp7.589.281.889

Ekuitas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.589.281.889 dan Rp5.238.437.757. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni TA 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp2.350.844.132 (44,87) % dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp7.589.281.889, sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp5.238.437.757.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp2.102.163

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.102.163 dan Rp3.665.736. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNB per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.000.000	2.102.163	70,07
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.000.000	0	0,00
Total Pendapatan		9.000.000	2.102.163	70,07

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
:
Rp3.217.926.979

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.217.926.979 dan Rp2.734.750.865. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	988.984.400	916.316.780	72.667.620	7,93
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.531	9.230	1.301	14,09
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	73.897.620	60.900.078	12.997.542	21,34
Beban Tunj. Anak PNS	24.016.306	21.220.752	2.795.554	13,17
Beban Tunj. Struktural PNS	17.660.000	15.600.000	2.060.000	13,20
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.597.400.000	1.282.450.000	314.950.000	24,55
Beban Tunj. PPh PNS	219.253.322	168.375.785	50.877.537	30,21
Beban Tunj. Beras PNS	46.348.800	45.045.240	1.303.560	2,89
Beban Uang Makan PNS	127.671.000	107.568.000	20.103.000	18,68
Beban Tunjangan Umum PNS	3.885.000	3.865.000	20.000	0,51
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	118.800.000	113.400.000	5.400.000	4,76
Total Beban Pegawai	3.217.926.979	2.734.750.865	5.400.000	151,38

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp21.003.000*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21.003.000 dan Rp20.541.250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.003.000	20.541.250	461.750	2,24
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	21.003.000	20.541.250	461.750	2,24

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp159.077.837*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp159.077.837 dan Rp150.319.862. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	25.871.445	17.932.722	7.938.723	44,26
Beban Jasa Pos dan Giro	0	662.940	(662.940)	(100)
Beban Keperluan Perkantoran	99.406.392	96.837.500	2.568.892	2,65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	15.200.000	15.200.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	18.600.000	17.841.700	758.300	4,25
Beban Bahan	0	1.845.000	(1.845.000)	(100)

Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	159.077.837	150.319.862	683.800	213,08

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp137.548.436*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp137.548.436 dan Rp167.896.230. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.150.000	92.900.000	(8750.000)	(9,41)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.400.000	12.000.000	(1.600.000)	(13,33)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.620.436	55.775.230	(17.154.794)	(30,75)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	3.795.000	(3.795.000)	(100)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4.378.000	3.426.000	952.000	27,78
Total Beban Pemeliharaan	137.548.436	167.896.230	952.000	125,72

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp23.733.200*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp23.733.200 dan Rp35.889.650. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	23.733.200	35.889.650	(12.156.450)	(33,87)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	23.733.200	35.889.650	(12.156.450)	(33,87)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp205.863.920

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp205.863.920 dan Rp192.943.975. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	127.537.544	147.404.009	(19.866.465)	(13.47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.326.376	45.239.966	33.086.410	73.13
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi,	0	0	0	0

dan Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap	0	300.000	(300.000)	(100,00)
Lainnya				
Jumlah Penyusutan	205.863.920	192.943.975	(300.000)	(40,34)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	205.863.920	192.943.975	(300.000)	(40,34)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp3.735.694

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	3.600.000	0	3.600.000	0,00
Lancar				
Penjualan Alat Angkut	0	0	0	0
Darat				
Defisit Penjualan Aset Non	135.694	(42.316)	178.010	(420,66)
Lancar				
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	3.735.694	(42.316)	3.778.010	(333,86)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.238.437.757 dan Rp5.063.074.613

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp3.759.315.515 dan Rp3.298.718.412 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.542.418.730 dan Rp0 Revaluasi Aset tersebut berasal dari hasil laporan inventaris dan penilaian BMN Nomor LHIP-190/WKN.12/KNL.03/2018 tanggal 22 Mei 2018.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0

Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.567.740.917 dan Rp3.680.154.755

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	5.702.357
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.573.443.274
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	3.567.740.917

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni TA 2018, DDEL sebesar Rp5.702.357 sedangkan DKEL sebesar Rp3.573.443.274

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni TA 2018, sebesar Rp0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 30 Juni TA 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	0
2	ABC	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.589.281.889 dan Rp5.444.510.956

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai adalah :

1. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 0147.01.000078.30.8 a.n. BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni TA 2018 sebesar Rp0

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA per 30 Juni 2018 tidak ada :

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB tetapi ada kesalahan akun berdasarkan surat Sekretaris MARI No. 374B/SEK/KS.00/06/2018 tanggal 04 Juli 2018 dari akun lama Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 423141 menjadi akun baru 425131. Untuk itu akan dilakukan ralat SPM untuk merubah akun lama ke akun baru setelah Laporan Semester I ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Akun penerimaan masih memakai akun lama 423141 dimana seharusnya penerimaan memakai akun baru 425131. Untuk itu akan dilakukan ralat SPM untuk merubah akun lama ke akun baru dan Revisi DIPA di Estmasi Pendapatan.

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Amuntai

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7					
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
3	Alat Kantor	5					
4	Alat Rumah Tangga	5					
5	Alat Studio	5					
6	Alat Komunikasi	5					
7	Unit Alat Laboratorium	8					
8	Komputer Unit	4					
9	Peralatan Komputer	4					
1	Alat Kerja Penerbangan	10					
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50					
3	Tugu/tanda Batas	50					
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
2	Alat Kantor	5					
3	Alat Rumah Tangga	5					
4	Alat Studio	5					
5	Alat Komunikasi	5					
6	Komputer Unit	4					
7	Peralatan Komputer	4					
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
9	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50					
1	Instalasi Lain	5					
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Amuntai

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
	Jumlah :						

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan Keuangan
005
01
1500
402556

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT